JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan
Volume 3, No 1 Februari 2022
ISSN: 2722-7405

STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA ALAM DI KABUPATEN BIMA

Haeril[1], Taufik Irfadat[2], Mas'ud[3]

[1,2,3] *Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima, Indonesia*
Email: haeril@stisipbima.ac.id

Article Info

Keyword:
Strategy[1],
Management[2],
Risk[3],
Disaster[4].

Abstract: The urgency of this research is to explain the strategy of the Disaster Management Agency in reducing disaster risk, reducing vulnerability, and increasing the capacity of the Government and Society in dealing with disasters in Bima Regency. As a leading sector in disaster management efforts, BPBD acts as a coordinator, facilitator, motivator, as well as implementing programs. The strategies implemented to reduce disaster risk in Bima Regency are strengthening institutional rules and institutions, integrated disaster management planning, implementing disaster education and research, capacity building, collaboration, and community participation, implementing disaster reduction strategies, and seeking to increase the effectiveness of disaster management. disaster emergency. From the various disaster management strategies above, the estuary is to seek integrated and collaborative disaster management as a new paradigm in more effective disaster risk reduction in Bima Regency.

Kata Kunci:
Strategi[1],
Penanggulangan[2],
Risiko[3],
Bencana[4].

Abstrak: *Urgensi dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi Badan Penanggulangan Bencana dalam mengurangi risiko bencana, menurunkan kerentanan, serta meningkatkan kapasitas Pemerintah dan Masyarakat dalam menghadapi bencana di Kabupaten Bima. Sebagai leading sector dalam upaya penanggulangan bencana, BPBD bertindak sebagai koordinator, fasilitator, motivator, sekaligus pelaksana program-program. Adapun strategi yang diterapkan guna mengurangi resiko bencana di Kabupaen Bima yaitu dengan memperkuat aturan dan kapasitas kelembagaan, perencanaan penanggulangan bencana terpadu, melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan Penelitian kebencanaan, peningkatan kapasitas, kolaborasi, dan partisipasi masyarakat, menerapkan strategi pengurangan risiko bencana, serta mengupayakan peningkatan efektivitas penanganan darurat bencana. Dari berbagai strategi penanggulangan bencana diatas muaranya adalah untuk mengupayakan penanggulangan bencana yang terpadu dan kolaboratif sebagai paradigma baru dalam pengurangan risiko bencana yang lebih efektif di Kabupaten Bima.*

Article History: Received 2-Desember-2021, Revised 9-Januari-2022, Accepted: 13-Februari-2022

PENGANTAR

Pada dasarnya dalam upaya mengurangi risiko bencana perlu mengupayakan aktifitas kewaspadaan dan kesiapsiagaan melalui prinsip penanggulangan bencana yang tepat (Faturahman, 2018). Namun keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana tentu sangat mengacu pada kemampuan dan strategi lembaga Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan dan melaksanakannya secara efektif (Hizbaron, et al., 2021). Dalam Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana antaralain, dilakukan melaui prinsip koordinasi, keterpaduan, kemitraan, dan pemberdayaan.

Untuk itu syarat pokok dalam upaya penanggulangan bencana adalah keterpaduan antar lembaga dan sektor dalam prinsip integratif yang berdasar pada kerjasama atau kemitraan antar seluruh pihak termasuk dengan masyarakat lokal (Tamitiadini, 2019). Karena dengan keterlibatan seluruh element sebagai perwujudan yang demokratis partisipatif dalam upaya penanggulangan bencana sehingga nantinya akan mampu mengidentifikasi, mengkodifikasikan, dan berbagi pengetahuan yang kemudian dapat digunakan oleh pengambil kebijakan dalam hal ini Pemerintah Daerah untuk dijadikan acuan dalam penanggulangan bencana (Haeril et al, 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah mensyaratkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada daerah-daerah yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan organisasi resmi pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan setara melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terarah, terpadu, dan menyeluruh.

Demikian di Kabupaten Bima. Sebagai daerah dengan kondisi geologis, geografis, demografis, dan sosial budaya yang rawan terjadinya bencana, Kabupaten Bima pernah merasakan dampak yang ditimbulkan akibat bencana, dari kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, bahkan dampak ekonomi dan psikologis, serta korban jiwa, sehingga memerlukan stategi penaggulangan bencana yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan, susunan, kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima. Pembentukan BPBD Kabupaten Bima diharapkan dapat menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional penanggulangan bencana daerah secara terarah dan terpadu. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi lembaga yang mampu mengkoordinasikan segala upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bima.

Untuk itu, adapun urgensi dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi Badan Penanggulangan Bencana dalam mengurangi risiko bencana, menurunkan kerentanan, serta strategi meningkatkan kapasitas Pemerintah dan Masyarakat dalam menghadapi bencana di Kabupaten Bima.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di BPBD Kabupaten Bima, Bappeda, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima, lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat studi kasus dan permasalahan yang terjadi. Subyek penelitian ini dipilih melalui teknik nonprobability sampling, dengan menggunakan teknik purposive sampling atau teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan aspek tertentu. Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi observation, wawancara dan dokumentasi. Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang harus lakukan adalah tahap analisa data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data model interaktif menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari dari tiga hal utama, yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Sebagai *leading sector* dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bima, BPBD berupaya untuk mengimplementasikan program-program yang ada dalam Dokumen RPB Daerah Kabupaten Bima dengan kerjasama lintas sektoral di instansi terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Bima. Pencapaian upaya penanggulangan bencana akan optimal jika terjalin kerjasama antara BPBD Kabupaten Bima dengan SKPD dan Instansi terkait.

Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, BPBD Kabupaten Bima bertindak sebagai koordinator, fasilitator, motivator, sekaligus pelaksana program-program. Namun karena keterbatasan sumberdaya yang dialokasikan untuk penyelenggaraan penanggulangan

bencana juga menjadi salah satu faktor pertimbangan utama BPBD Kabupaten Bima perlu menerapkan strategi khusus dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara umum strategi ini bersifat kolaboratif. Strategi ini diterapkan dalam pembuatan dokumen rencana dan pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bima. Berikut adalah beberapa strategi penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bima yaitu;

Perkuatan Aturan dan Kapasitas Kelembagaan

Strategi ini merupakan upaya dalam menata ulang peraturan yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain itu juga selaras dengan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan yang terkait dengan upaya pengurangan risiko bencana. Upaya perkuatan aturan dan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaannya di Kabupaten Bima difokuskan untuk mencapai penguatan kerangka Hukum penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peningkatan kapasitas serta akuntabilitas tata kelola penanggulangan bencana.

Harapannya tata kelola yang baik perlu menjadi sebuah komitmen bersama dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta pengawasan bersama menjadi komponen inti nya. Dalam pengawasan bersama, dibutuhkan suatu mekanisme yang mampu menyediakan data yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan analisis manfaat-biaya. Analisis manfaat biaya ini dapat memperlihatkan nilai efektivitas program-program yang dijalankan untuk pengurangan risiko bencana dengan harapan dapat meningkatkan akuntabilitas tata kelola yang lebih baik.

Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu

Strategi dalam perencanaan penanggulangan bencana secara lebih terpadu di Kabupaten Bima difokuskan dalam upaya mengintegrasikan RPB kedalam RPJMD. Perencanaan ini ditindaklanjuti kedalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan seluruh SKPD. Untuk mencapai sasaran dalam mewujudkan perencanaan penanggulangan bencana terpadu dapat melalui program seperti, pengarusutamaan Penanggulangan Bencana dalam Pembangunan, pemaduserasian mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pendidikan, pelatihan, dan Penelitian

Pada dasarnya Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bima merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bima dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya di Kabupaten Bima dan sekaligus wujud dan peran serta pemerintah daerah Kabupaten Bima dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional. Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bima merupakan tanggung jawab bersama dengan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama.

Dalam upaya penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan secara mendadak melainkan butuh persiapan yang dilakukan bahkan jauh sebelum bencana itu datang, melalui proses yang disebut manajemen bencana. Salah satu persiapan yang dilakukan sebelum bencana itu datang adalah dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia dengan baik. Baik sumber Daya manusia internal Badan Penaggulangan Bencana (BPBD), maupun seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bima. Mengingat bencana alam tidak bisa diketahui secara pasti kapan dan dimana akan terjadi, sehingga perlu adanya kesiapan Sumber Daya Manusia yang siap dan tanggap dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu terjadi.

Untuk itu strategi ini, diharapkan adanya perubahan jangka panjang yang berfokus pada pergeseran paradigma untuk pengurangan risiko bencana yang lebih efektif. Pola pergeseran paradigma dapat menggunakan pengembangan strategi pendidikan dan penyadaran pada pendidikan formal, nonformal, informal dan bentuk informasi yang mungkin. Pergeseran paradigma ini seharusnya membuat trend baru dan bagian dari gaya hidup modern di masyarakat umum. Sangat penting untuk membangun paradigma ini menjadi sesuatu yang dihargai dan berkembang dengan pola-pola yang mungkin ditiru oleh masyarakat.

Upaya dasar yang dapat dilakukan dengan pemberdayaan hasil riset terapan baik dari perguruan tinggi maupun penelitian yang berkaitan penanggulangan bencana. Salah satunya melalui kajian rasio perbandingan investasi (*cost benefit analys*) terhadap setiap fase penanggulangan bencana. Selain itu dapat dikembangkan juga hasil riset yang dapat diterapkan secara langsung oleh individu dan keluarga seperti pembangunan rumah aman Gempa, sumur resapan dan lainnya. Diharapkan dengan adanya beberapa riset terkait penanggulangan bencana

di Kabupaten Bima dapat menurunkan kerentanan daerah terhadap risiko muti bahaya. Selain itu, melalui pendidikan dan pelatihan diharapkan adanya kesadaran dan pola pikir masyarakat dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana.

Kemudian dalam Penyusunan rencana aksi kesiapsiagaan bencana perlu disusun ditingkat masyarakat secara partisipatif. Dengan Pola pendekatan yang bersifat trend-setter, mengedepankan pembangunan ketangguhan komunitas. Sehingga pengurangan risiko bencana menjadi prioritas dan pengarusutamaan untuk dapat diterapkan sampai ke tingkat desa. Sebab Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam penaggulangan bencana adalah sebagai upaya meningkatkan kualitas, kemampuan, peningkatan kesadaran, kepercayaan diri, dan pengembangan kelembagaan dalam penanggulangan bencana.

Peningkatan Kapasitas, Kolaborasi, dan Partisipasi Masyarakat

Strategi dalam peningkatan kapasitas, kolaborasi, dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Bima difokuskan kepada program pemberdayaan masyarakat dan perkuatan fungsi kemitraan dalam pengurangan risiko bencana melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan bencana. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan kemandirian dan keterlibatan aktif masyarakat. Selain itu juga adanya peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana**.**

Melalui perkuatan fungsi kemitraan dan kolaborasi dapat menggalang berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan risiko bencana di luar anggaran APBN dan APBD. Tidak hanya itu, arah kemitraan yang bersifat cair lebih memungkinkan untuk penyelesaian masalah yang bersifat mendesak diluar proses birokrasi. Kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dikembangkan dalam upaya perlindungan perekonomian. Kemitraan ini dapat menggalang kontribusi dukungan partisipatif sektor swasta dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kemudian agar tercipta efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu perkuatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB). Melalui forum PRB Kabupaten Bima yang terdiri dari aktor lintas sektoral diharapkan mampu mempercepat kemajuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Aktor lintas sektoral yang merupakan pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam melaksanaan perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bima.

Sedangkan untuk menyiapkan dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam peanggulangan bencana, di internal BPBD maupun lembaga Pemerintah di tingkat Kabupaten Bima melakukan pengembangan secara informal dimana pegawai membaca dan mempelajari literature/buku tentang upaya penaggulangan Bencana. Sedangkan Pengembangan secara formal, dimana pegawai Kabupaten Bima mengikuti pendidikan dan pelatihan tangguh bencana.

Selain itu dalam upaya penguatan Sumber Daya Manusia dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Bima melalui program optimalisasi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat untuk penanggulangan bencana, melakukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam aksi tanggap darurat dan pascabencana. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bima juga melakukan pelatihan peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan perbaikan kerusakan lahan/lingkungan secara mandiri, agar tercipta kemampuan masyarakat dalam melakukan prediksi perkembangan kejadian bencana, penilaian kerusakan serta taksiran kebutuhan masa tanggap darurat. Selain itu juga Penggalangan kontribusi dukungan partisipasi sektor swasta dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kemudian Pelatihan dan Pembentukan Kelompok Relawan Sadar/siaga Bencana di tiap-tiap kecamatan, selain itu dengan pembentukan forum pengurangan resiko bencana dengan Pelibatan Tim Akademisi. Dimana kegiatan rutinnya adalah kajian Prabencana dan Pembentukkan Desa Tangguh Bencana Pada lokasi desa yang punya potensi bencana dengan membentuk relawan di tip-tiap desa melaui kegiatan pelatihan dan simulasi yang dilakukan tiga hari agar masyarakat tidak kaget dan merespon secara cepat ketika terjadi bencana, upaya mandiri dalam penyelamatan dan tentunya untuk menghindari adanya korban jiwa. Kemudian melahirkan Dokumen rencana Penaggulangan Bencana dan mengintegrasikan dengan dokumen yang ada didesa. Strategi ini untuk mewujudkan langkah penanggulangan bencana yang

membutuhkan *multi-stakeholder,* antar sektor, antara ilmu pengetahuan dan manajemen dengan aktifitas yang kompleks, serta keterlibatan banyak sektor dan sumber daya.

Namun berdasarkan analisis terhadap data ketahanan, kesiapsiagaan, kerentanan, dan kapasitas di Kabupaten Bima dalam Penanggulangan Bencana menetapkan kebijakan dan strategi yang salah satunya adalah penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dimana program prioritas dari pengembangan dan peningkatan kelembagaan tersebut antara lain: Penguatan manajemen bencana pada institusi penanggulangan bencana, pengembangan sistem kesiapsiagaan terhadap bencana dan mengkoordinasikan para pemangku kepentingan.

Dengan mengacu pada uraian di atas maka diketahui bahwa kenyataan di lapangan terkait dengan fungsi koordinasi kelembagaan antara BPBD dengan instansi lainnya dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bima ternyata belum menunjukkan hasil yang efektif. Diketahui adanya indikasi-indikasi permasalahan sebagai berikut:

a) Pada pra bencana, banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kurang proaktif dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi atau simulasi. Hal itu terlihat pada waktu simulasi tanggap bencana menurut keterangan dari BPBD banyak yang tidak hadir.
b) Alur pengambilan keputusan dan peran dari tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah masih bersifat parsial. Hal ini tercermin dari belum adanya kesamaan pandangan dan *action* di lapangan terutama pada upaya mitigasi dan tanggap darurat.

Strategi Pengurangan Risiko Bencana

Merupakan strategi kolaborasi paling penting yang dilakukan sebelum terjadinya bencana adalah upaya pengurangan risiko. Dimana strategi ini diharapkan dapat mencegah bahaya. Upaya pencegahan bahaya lebih kepada pengurangan tingkat risiko yang akan muncul dengan melakukan pengelolaan pada lokasi sumber bahaya. Dengan adanya perlakuan di sumber bahaya maka diharapkan kejadian bencana dapat dihilangkan.

Kemudian dengan mengurangi kerentanan. Dengan pelaksanaan program ini diharapkan dapat mengurangi tingkat risiko yang akan muncul dengan melakukan mitigasi struktural maupun nonstruktural. Selain itu, peningkatan kapasitas juga diharapkan dapat lebih menyeluruh bukan hanya terfokus satu atau dua jenis bencana saja.

Peningkatan Efektivitas Penanganan Darurat Bencana

Upaya peningkatan efektivitas penanganan darurat bencana difokuskan kepada Peningkatan kesiapan menghadapi bencana, dan optimalisasi operasi tanggap darurat dan percepatan pemulihan dini dengan pelibatan BPBD yang didukung oleh BAPPEDA, Dinsosnaker, KESBANGPOL, Dishubkominfo, BMKG, BPMPKB, PU, DINKES, dan Desa-desa yang ada di Kabupaten Bima.

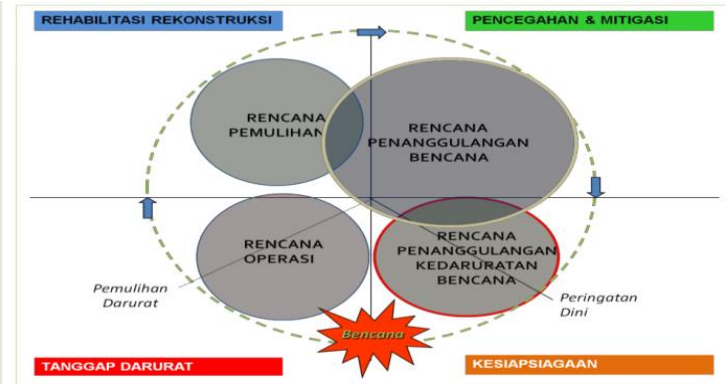

Sumber: dokumen RPB tahun 2018-2022

Gambar 1. Rencana Penanggulangan Bencana dalam Tahapan Manajemen Bencana Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Bima

Dari enam strategi penanggulangan bencana diatas muaranya adalah untuk mengupayakan penanggulangan bencana yang terpadu dan kolaboratif. Berikut adalah gambar rencana penanggulangan bencana dalam tahapan manajemen bencana terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Bima.

Untuk itu, penanggulangan bencana sebagai aktifitas yang membutuhkan peran *multi-stakeholder,* antar sektor, antara ilmu pengetahuan dan manajemen, maka seluruh elemen harus bisa berkolaborasi dalam pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya baik sumber daya manusia maupun keuangan agar pelaksanaan manajemen bencana bisa berjalan maksimal. Seperti yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bima bersama Tagana, TNI dan masyarakat membersihkan puing-puing sisa kebakaran di Desa Ngali Kecamatan Belo. Ini sebagai bentuk kolaborasi yang dilakukan BPDB dalam kegiatan pasca bencana.

Namun disisi lain dalam pelaksanaan manajemen bencana di Kabupaten Bima mendapati kendala akibat ego sektoral. Perbedaan kepentingan dari berbagai sektor seringkali menyebkan upaya-upaya penanggulangan bencana menjadi tidak maksimal dilakukan. Ego sektoral akibat perbedaan kepentingan dalam pengelolaan suatu kawasan menyebabkan terjadinya bencana yang lebih besar. Misalnya ketika Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kelautan Perikanan punya program bina lingkungan dan konservasi di Wilayah pesisir untuk menjaga pesisir dari banjir rob dan bencana perubahan iklim lainnya, namun karena ada kepetingan dari Dinas PU untuk pembangunan seperti halnya di peisisr Palibelo, menyebabkan air laut seringkali menggenangi landasan pacu bandara Sultan Muhammad Salahudin Bima akibat tidak ada penyangga dipesisir.

KESIMPULAN

Sebagai *leading sector* dalam upaya penanggulangan bencana, BPBD bertindak sebagai koordinator, fasilitator, motivator, sekaligus pelaksana program-program untuk mengurangi risiko bencana, menurunkan kerentanan, serta meningkatkan kapasitas Pemerintah dan Masyarakat dalam menghadapi bencana di Kabupaten Bima. Adapun strategi yang diterapkan guna mengurangi resiko bencana di Kabupaen Bima yaitu dengan memperkuat aturan dan kapasitas kelembagaan, perencanaan penanggulangan bencana terpadu, melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan Penelitian kebencanaan, peningkatan kapasitas, kolaborasi, dan partisipasi masyarakat, menerapkan strategi pengurangan risiko bencana, serta mengupayakan peningkatan efektivitas penanganan darurat bencana. Dari berbagai strategi penanggulangan bencana diatas muaranya adalah untuk mengupayakan penanggulangan bencana yang terpadu dan kolaboratif sebagai paradigma baru dalam pengurangan risiko bencana yang lebih efektif di Kabupaten Bima.

REFERENSI

Ahdi, D. (2015). Perencanaan Penanggulangan Bencana Melalui Pendekatan Manajemen Risiko. REFORMASI, 5(1), 13-30.

Faizah, N., & Buchori, I. (2018). Model Pemetaan Risiko Kekeringan Di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro).

Haeril, H., Iradat, T., & Hendra, H. (2021). Penerapan Kebijakan Mitigasi Bencana (Fisik dan Nonfisik) dalam Mengurangi Risiko Bencana di Kabupaten Bima. Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 3(1), 23-47.

Hizbaron, D. R., Sudibyakto, H. A., & Ayuningtyas, E. A. (2021). Kajian Kapasitas Masyarakat Lembaga Pemerintah dan Swasta dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Yogyakarta. UGM PRESS.

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan, susunan, kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima.

Sugiyono. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&B. Alfabeta. Bandung.

Tamitiadini, D., Adila, I., & Dewi, W. W. A. (2019). Komunikasi bencana: Teori dan pendekatan praktis studi kebencanaan di Indonesia. Universitas Brawijaya Press.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.